



Sultan Berpesan Soal Pengentasan Kemiskinan

■ Legislatif Minta Pj Wali Kota Tingkatkan Kesejahteraan Melalui Keistimewaan

YOGYA, TRIBUN - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, resmi melantik Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Minggu (22/5). Sultan meminta kedua pejabat kepala daerah untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara RI.

Dua penjabat yang dilantik adalah Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY, Sumadi sebagai Pj Wali Kota Yogya, serta Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah Setda DIY, Tri Saktiyana sebagai Pj Bupati Kulon Progo.

Seperti diketahui, masa jabatan kedua kepala daerah periode 2017-2022 berakhir tepat Minggu (22/5). Karena proses Penunjukan Kepala Daerah (Pilkada) baru dilaksanakan pada 2024 mendatang, maka kekosongan kursi kepala daerah perlu segera diisi oleh seorang penjabat hingga bupati/walikota definitif dilantik.

"Pilot project ini diharapkan dapat menghasilkan *output* berupa daerah percontohan praktik reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan yang baik, dengan *outcome* terwujudnya reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan yang berkualitas pada pemerintah daerah," ujar Sultan dalam pelantikan tersebut.

Sri Sultan mengatakan, secara garis besar, penjabat memiliki esensi tugas yang sama dengan kepala daerah definitif sebelumnya. Yakni memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Penjabat juga perlu mem-

LANJUTKAN PROGRAM

- Gubernur DIY melantik Penjabat (Pj) Wali Kota Yogya dan Bupati Kulon Progo di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Minggu (22/5).
- Pj Wali Kota Yogya adalah Sumadi dan Pj Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana.
- Sultan meminta dua Pj kepala daerah untuk aktif dalam program pengentasan kemiskinan.
- Legislatif meminta Pj Wali Kota bisa menjadi jembatan program keistimewaan untuk kesejahteraan warga.

fasilitasi persiapan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Meski menjadi kepala daerah, wewenang penjabat juga dibatasi. Misalnya tidak melakukan pengisian jabatan dan mutasi pegawai.

Kemudian tidak membantalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan apa yang sudah dikeluarkan pejabat sebelumnya. "Lalu membuat kebijakan pemekaran daerah dan membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya," kata Sultan.

Kalangan legislatif berharap Pj Wali Kota Yogyakarta mampu melanjutkan deretan program yang telah disusun. Salah satu yang jadi sorotan adalah, upaya peningkatan kesejahteraan selama dua tahun ke depan.

Jadi jembatan

Anggota DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan berujar, sebagai aparatur sipil negara di lingkup Pemda DIY, Sumadi dituntut untuk berperan sebagai jembatan. Khususnya, mengenai program-program keistimewaan, di mana dampaknya diharapkan dapat lebih dirasakan.

"Ya, Pj Wali Kota harapan kami bisa menjadi penyambung harapan warga kota dengan Pemda DIY. Terutama, terkait dengan program-program keistimewaan, agar benar-benar bisa berdam-

pak pada peningkatan kesejahteraan warga kota," katanya.

Terlebih, momentum pelandaian kasus Covid-19 yang kini sudah semakin tampak, harus mampu dimaksimalkan untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi. Sehingga, ia pun meminta, supaya Pj yang baru saja dilantik, bisa segera melakukan konsolidasi internal dan eksternal.

"Langsung konsolidasikan dengan internal birokrasi di lingkungan Pemkot, dan bekerjasama dengan DPRD Kota Yogyakarta," cetusnya.

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra tersebut tak terlalu khawatir dengan kekosongan kepala daerah secara definitif selama tiga tahun anggaran kedepan. Hanya saja, pihaknya mendorong Pj mempertajam rancangan pembangunan jangka menengah daerah yang bakal berakhir.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Yogyakarta lainnya, Riki Listyanto, berharap, Pj Wali Kota Sumadi bisa mengambil peran dalam menjaga stabilitas pemerintahan, dari segala dinamika yang terjadi di lingkungan Pemkot. Selain itu, agenda Pilkada 2024 juga harus segera dipikirkan.

"Tentunya, Pj harus bisa lebih baik dalam mempersiapkan Pilwako 2024. Masih ada waktu sekitar dua tahun kan, saya rasa itu relatif sangat cukup," jelas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. (**tro/aka**)



TUGAS BARU - Sri Sultan HB X (tengah) bersama penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana (kanan), dan Pj Wali Kota Yogya, Sumadi (kiri) yang baru dilantik, Minggu (22/5).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005